

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya tujuan utama yang ingin dicapai oleh semua perusahaan bagaimana perusahaan dapat memperoleh laba sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas atau tindakan ekonomi perusahaan. Konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan misalnya penggundulan hutan, polusi udara dan air, dan perubahan iklim (Ratnasari dan Prastiwi, 2011). Hal ini mendorong perusahaan untuk tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan semata (*single bottom line*) melainkan harus meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang sering disebut *triple bottom line* (Kusuma dkk, 2014). Karena banyaknya kerusakan lingkungan akhir-akhir ini yang diakibatkan dari kegiatan operasional perusahaan menjadi sorotan masyarakat luas sehingga perusahaan mendapat kecaman dari berbagai pihak mengenai kegiatan operasional perusahaan dikarenakan perusahaan tidak memperhatikan lingkungan sosial disekitar.

Corporate social responsibility dapat diartikan bahwa sebuah perusahaan harus bertanggung jawab untuk setiap tindakan yang dapat mempengaruhi orang-orang, masyarakat, dan lingkungan mereka (Putri, 2013). Pelaporan keuangan merupakan salah satu media bagi manajemen perusahaan dalam memberikan informasi kinerja keuangan entitas yang mempunyai manfaat untuk *stakeholder* sebagai media pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan sumber daya

yang dipercayakan kepada mereka. Sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dengan menimbang dan mengingat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang perseroan terbatas, dalam peraturan pemerintah, perseroan yang kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mengingat akan hal tersebut maka sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga dan peduli terhadap aspek lingkungan alam dimana perusahaan tersebut beroperasi. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan *stakeholder* lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan *corporate social responsibility*. Pelaksanaan dan pengungkapan juga mulai berperan didalam dunia pasar modal maupun pengambilan keputusan manajemen.

Para investor pun akan tertarik terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Survey global yang dilakukan oleh *The Economist Intelligence Unit* menunjukkan bahwa 85% eksekutif senior dan investor dari berbagai organisasi menjadikan *corporate social responsibility* sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan (Warta Ekonomi, 2006). Dengan adanya hal tersebut membuktikan bahwa penerapan Berikut adalah beberapa fenomena, diantaranya sebagai berikut:

Kawasan Industri Jababeka (Jawa Barat Bekasi) di Cikarang, Jawa Barat, tidak mengabaikan warga yang tinggal di sekitarnya. Sebab menjadi ironi, jika di samping Kawasan Industri besar dan pemukiman yang mewah, ada warga yang

hidup penuh keterbatasan dan justru menanggung dampak negatif dari keberadaan 'Kawasan Elit' tersebut. Namun, perusahaan di kawasan Jababeka tidak maksimal menjalankan program CSR kepada warga. Bahkan ada yang mengalami dampak negatif, seperti banjir yang menunjukkan bahwa tidak adanya perhatian bagi warga sekitar. Dikarenakan dana CSR tidak dikelola dengan baik dan tidak dipadukan dengan program pemerintah daerah. Seharusnya dengan ribuan perusahaan yang berada di daerah tersebut, warga di daerah sekitar mendapatkan manfaat, baik pembangunan sarana prasarana dan kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan (www.nasionalkontan.com)

Masa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, melakukan demonstrasi di Makassar terkait dana CSR PT Semen Tonasa, Tbk. PT Semen Tonasa, Tbk tidak transparan kepada masyarakat sebab masyarakat sekitar tidak mengetahui adanya anggaran yang digelontorkan untuk pengelolaan CSR. Masyarakat hari ini hampir tidak menikmati dana tersebut. Masyarakat hanya mendapatkan setiap harinya hujan debu, asap tebal dan kebisingan saat pabrik beroperasi. Ia bahkan menuding pihak PT Semen Tonasa, Tbk mengelontorkan dana CSR tersebut hanya kepada kalangan para keluarga pegawai perusahaan, sehingga keberpihakan perusahaan perlu dipertanyakan. Seharusnya dua persen dari laba bersih perusahaan disalurkan ke masyarakat. Untuk itu kami mendesak kepada pimpinan, direksi PT Semen Tonasa, Tbk untuk mengoptimalkan dana CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan (www.republika.com).

Dari kedua fenomena di atas dapat dilihat bahwa memang pencemaran lingkungan banyak dilakukan oleh perusahaan yang memang dilatar belakangi oleh kegiatan perusahaan dalam memanfaatkan alam, dan perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu secara optimal melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan. Tetapi hal itu tidak menjadi penghalang bagi pemerintah untuk mewajibkan perusahaan dari sektor lain melakukan kegiatan tanggung jawab sosial korporatnya. Berikut ini Faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate social responsibility* meliputi variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, tipe industri, *leverage*, dan regulasi pemerintah.

Faktor yang pertama adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, bank dan *asset management* (Kusuma dkk,2014) Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Sari dkk, 2013). Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*. Karena semakin tinggi kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka perusahaan dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) juga akan cenderung lebih luas (Sari dkk,2013). Pendapat lain dikemukakan oleh (Nukhin, 2009) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.

Faktor yang kedua adalah dewan komisaris. Dewan Komisaris merupakan jabatan tertinggi yang ada dalam suatu perusahaan yang bertugas untuk mengawasi kerja seluruh organ pada perusahaan tersebut (Fitri, 2012). Dewan komisaris berpengaruh positif karena dengan adanya dewan komisaris perusahaan dapat menjalankan peran dan fungsinya, keberadaan dewan komisaris dapat memberikan kendali dan monitoring bagi manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial, dewan komisaris juga memberikan tekanan kepada manajemen untuk melaksanakan aktivitas dan pengungkapan CSR dengan baik (Nurkhin, 2009). Pendapat lain dikemukakan oleh Nurfadilah dan Sagara (2015), yang menghasilkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*, karena setiap perusahaan yang berbadan hukum maupun perusahaan yang *go public* pasti akan mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya, jadi besar kecilnya dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap seberapa besar perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya melainkan karena ketundukan perusahaan terhadap regulasi pemerintah.

Faktor yang ketiga adalah komite audit. Komite audit merupakan departemen yang mempunyai tugas membantu pengawasan dewan komisaris terhadap perusahaan tersebut (Fitri, 2012). Komite audit berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* apabila semakin sedikit jumlah anggota komite audit akan semakin efektif dalam pengawasan terhadap laporan keuangan berkaitan dengan luas pengungkapan *corporate social*

responsibility Wiyuda dan Pramono (2017). Pendapat lain dikemukakan Nurfadilah dan Sagara (2015), yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.

Faktor yang ke empat adalah profitabilitas. Profitailitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham (Herawati, 2015). Profitabilits berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*, karena perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi akan mengungkapkan informasi CSR yang telah dilakukan (Wiyuda, 2017). Hal ini berbeda dengan pendapat Iswandika dkk (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.

Faktor yang kelima adalah ukuran perusahaan. Ukuran persahaan menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility* (Putri, 2013), pendapat tersebut didukung dengan (Kusuma dkk, 2014), berbeda dengan pendapat Nurfadilah dan Sagara (2015) yang menghasilkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif karena ukuran perusahaan yang lebih besar tidak lepas dari tekanan, aktivitas operasi yang lebih besar dan memberikan pengaruh besar kepada masyarakat akan membuat pemegang saham lebih memperhatikan program sosial perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial akan semakin luas.

Faktor yang ke enam adalah tipe industri. Tipe industri merupakan karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan yang berkaitan dengan bidang usaha, risiko usaha, karyawan yang dimiliki dan lingkungan yang dikelompokkan menjadi dua yaitu *high profile* dan *low profile*. Menurut Wiyuda dan Pramono (2017) tipe industri tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*, berbeda dengan pendapat Sembiring (2005) yang menghasilkan bahwa tipe industri berpengaruh positif karena perusahaan yang bertipe *high profile* dalam melakukan aktivitasnya banyak memodifikasi lingkungan, dan menimbulkan dampak yang negatif terhadap masyarakat.

Faktor yang ke tujuh adalah *leverage*. *Leverage* merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham rasio ini menggambarkan struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya utang. Menurut Wiyuda dan Pramono (2017) *leverage* tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*, karena semakin tinggi tingkat *leverage* maka perusahaan akan mengurangi pengungkapan informasi pertanggung jawaban sosial. Hal ini berbeda dengan pendapat Marcellyna (2013) yang menghasilkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Faktor yang ke delapan adalah regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan perusahaan, sebab sebagai badan pembuat peraturan, pemerintah memiliki peran signifikan terhadap kebijakan yang dibuat oleh perusahaan terhadap lingkungan eksternalnya. Regulasi pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan

corporate social responsibility (Nurfadilah dan Sagara, 2015) karena regulasi pemerintah merupakan badan pembuat peraturan yang memiliki peran penting terhadap kebijakan yang dibuat oleh perusahaan terhadap lingkungan eksternalnya. Berbeda dengan Basuki dan Patrioty (2008) yang menghasilkan bahwa regulasi pemerintah tidak berpengaruh dalam luas pengungkapan tanggung jawab sosial.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate social responsibility* menyatakan hasil yang berbeda-beda. Maka dari itu sangat diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai pengungkapan *corporate social responsibility* tersebut. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wiyuda dan Pramono (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wiyuda dan Pramono (2017) yang pertama adanya penambahan variabel regulasi pemerintah karena untuk mengendalikan suatu perusahaan dengan batasan-batasan tertentu dan regulasi pemerintah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan perusahaan. Perbedaan yang kedua yaitu tahun penelitian yang dilakukan adalah periode 2014-2017, sedangkan pada penelitian Wiyuda dan Pramono (2017) sampel yang digunakan adalah tahun 2015.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, DAN REGULASI PEMERINTAH TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN**

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2017”.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017.
2. Didalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, tipe industri, *leverage*, dan regulasi pemerintah.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, berikut ini merupakan perumusan masalah yaitu:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*?
2. Apakah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*?
3. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility* ?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*?

6. Apakah tipe industri berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*?
7. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*?
8. Apakah regulasi pemerintah berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari peneliti adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.
3. Untuk menganalisis pengaruh komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.
4. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.
5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.
6. Untuk menganalisis pengaruh tipe industri berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.
7. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.

8. Untuk menganalisis pengaruh regulasi pemerintah berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca mengenai hal-hal yang berhubungan dengan luas pengungkapan *corporate social responsibility*.

2. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada perusahaan untuk menjadi bahan pertimbangan mengenai kebijakan luas pengungkapan *corporate social responsibility* dalam perusahaan Indonesia serta member manfaat guna meningkatkan reputasi perusahaan dan meningkatkan kualitas perusahaan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip tatakelola perusahaan.

3. Bagi *Stakeholder*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi agar dalam berinvestasi para pemangku kebijakan (*stakeholder*) memilih perusahaan yang transparan dalam mengungkapkan informasi dan memiliki kinerja ekonomi sosial, dan lingkungan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

4. Bagi Pemerintah

Untuk mengetahui sampai sejauh mana pengungkapan *corporate social responsibility* yang telah dilakukan perusahaan. Sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan suatu standart pelaporan CSR yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

